



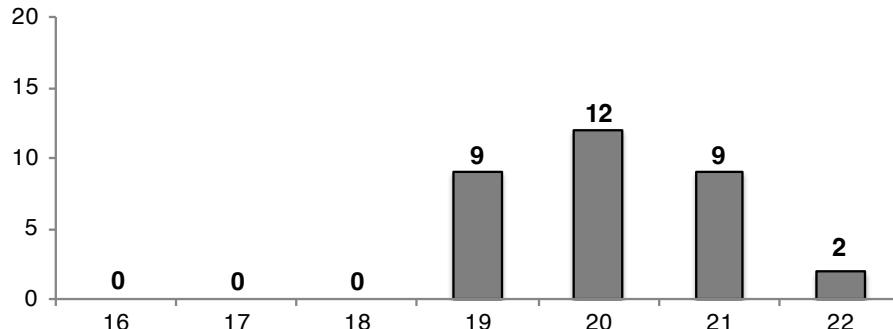
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(22 Agustus 2025)**

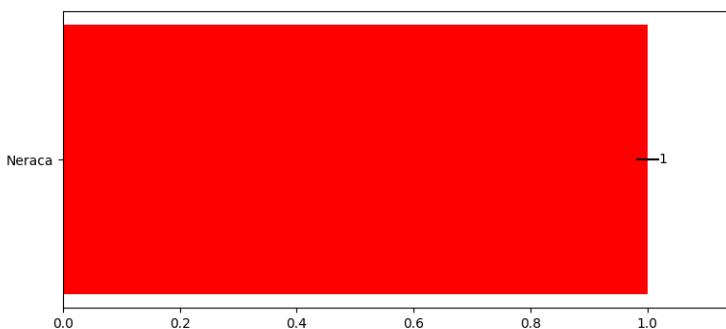
Summary

| Media | News | Positive | Neutral | Negative |
|-------|------|----------|---------|----------|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

Daily Statistic



Media Share



Influencers

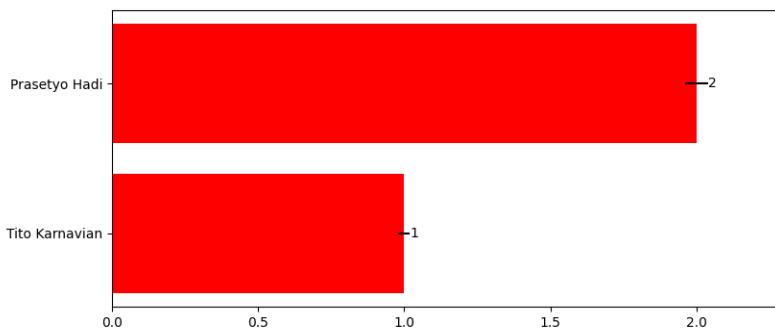


Table Of Contents : 22 Agustus 2025

| No | Date | Media | News Title | Page | Sentiment | Influencers |
|----|-----------------|------------------|--|------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 22 Agustus 2025 | Neraca | Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda | 12 | Positive | Prasetyo Hadi, Tito Karnavian |
| 2 | 22 Agustus 2025 | Radar Pekalongan | Hasil Survei: 64,6 Persen Masyarakat Jateng Puas Kinerja Gubernur Ahmad Luthfi | 5 | Positive | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| Title | Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda | | |
| Media | Neraca | Reporter | agus |
| Date | 2025-08-22 | Tone | Positive |
| Page | 12 | PR Value | |

Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda

NERACA

Jakarta - Pemerintah Pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belakangan menuai sorotan publik. Lonjakan tarif pajak di sejumlah daerah disebut sebagai keputusan murni pemerintah daerah dan DPRD setempat melalui Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan tudungan bahwa kenaikan PBB-P2 merupakan dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat adalah pandangan yang terburu-buru. "Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur," kata Hasan.

Hasan mencontohkan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mencatat kenaikan PBB-P2 hingga beberapa kali lipat. Ia menegaskan, fenomena itu merupakan bagian dari dinamika lokal, hasil keputusan kepala daerah bersama DPRD. "Kalau ada kejadian spesifik, seperti di Kabupaten Pati, ini adalah murni dinamika lokal," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, juga membantah bahwa masyarakatnya kebijakan kenaikan pajak daerah berkaitan dengan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut dia, setiap daerah memiliki pertimbangan sendiri sebelum menetapkan tarif pajak. "Tidak ada penyebabnya karena itu, bukan ya (kurang anggaran dari pusat). Itu memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah, dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, penyesuaian tarif PBB-P2 biasanya didasari evaluasi kon-

disi ekonomi dan kebutuhan pendapatan daerah. "Kalau pun ada rencana atau kebijakan penaikan PBB itu di daerah masing-masing," katanya menegaskan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahkan turun tangan langsung menyikapi lonjakan PBB-P2 di Kabupaten Pati yang mencapai 250 persen. Ia mengaku telah menghubungi Bupati Pati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk meminta klarifikasi. "Saya langsung telepon Pak Bupati Pati, Pak Gubernur Jawa Tengah. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu," kata Tito.

Tito menjelaskan, perda yang mengatur PBB-P2 biasanya bersifat umum, sementara penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif spesifik menjadi kewenangan bupati atau wali kota. Proses ini dilakukan dengan konsultasi ke gubernur, bukan ke Kementerian Dalam Negeri. "Yang me-review adalah gubernur. Makanya, tidak sampai ke saya, tapi ke gubernur," ujar mantan Kapolri itu.

Kemendagri kini meneliti kebijakan di Pati untuk memastikan kenaikan tersebut tidak membebani masyarakat. Tito menekankan bahwa autonomi daerah bukan berarti kepada daerah bebas menetapkan pajak tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar warga.

Kenaikan PBB-P2 di jumlah wilayah akhir-akhir ini memicu perdebatan lebih luas.

Di satu sisi, daerah memerlukan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

Masyarakat pun berharap kebijakan pajak tetap sejalan dengan daya beli.

Pemerintah pusat berjanji akan terus menghormati kewenangan daerah dalam mengelola fiskalnya. Namun, mekanisme pengawasan akan diperkuat untuk memastikan kebijakan pajak yang diambil tetap adil, proporsional, dan tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.  agus

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| Title | Hasil Survei: 64,6 Persen Masyarakat Jateng Puas Kinerja Gubernur Ahmad Luthfi | | |
| Media | Radar Pekalongan | Reporter | Anang |
| Date | 2025-08-22 | Tone | Positive |
| Page | 5 | PR Value | |



TINGKAT KEPUASAN - Kepuasan pada kinerja Ahmad Luthfi sebesar 64,6 persen, dan untuk Taj Yasin Maimoen 59,7 persen.

Hasil Survei: 64,6 Persen Masyarakat Jateng Puas Kinerja Gubernur Ahmad Luthfi

SEMARANG – Hasil survei menyebut tingkat kepuasan tinggi pada kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakilnya Taj Yasin Maimoen. Kepuasan pada kinerja Ahmad Luthfi sebesar 64,6 persen, dan untuk Taj Yasin, Maimoen 59,7 persen.

Perseliti Lithbang Kompas, Ariza Nugraheni menjelaskan, tingginya angka kepuasan masyarakat pada Ahmadi Luthfi dan Taj Yasin,

menjadi modal yang baik untuk pembangunan Jawa Tengah ke depannya. Hal itu memiliki makna, masyarakat Jateng memberikan apresiasi terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur maupun Pemprov Jateng.

"Sebenarnya jika dilihat (hasil survei), kita harus lihat bahwa Ahmad Luthfi dan Taj Yasin ini baru enam bulan bekerja, tingkat kepuasan di atas 60 persen.

Dan ini modal yang baik," kata Atta, Rabu (21/8/2025). Jika hasil survei tersebut diperinci, ada 61,2 persen responden mengaku puas dengan kinerja Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Sementara 3,4 persen lainnya mengaku sangat puas. Sementara, untuk kinerja Wakil Gubernur Taj Yasin, sebanyak 57,1 persen responden menyatakan puas dan 2,6 persen mengaku sangat puas.

"Hal yang sama di bidang biaya pelayanan publik yang terjangkau, yakni 5,8 persen

responden menyatakan sangat puas dan 68,4 persen mengaku puas. Dalam hal mengantarkan kemacetan, ada 3,8 persen responden mengaku sangat puas dan 67,5 persen puas.

Sementara, di bidang penanganan penyakit mental dan premanisme ada di urutan keempat, dengan 4,0 persen responden menyatakan sangat puas dan 71,4 persen puas.

Hal yang sama di bidang transportasi umum yang

memadai, ada 5,2 persen sangat puas dan 63,7 persen puas.

Demikian halnya di bidang pemangaman buncana alam, sebanyak 3,4 persen responden mengaku sangat puas dan 63,5 persen puas.

Selanjutnya, di bidang peningkatan kualitas pendidikan (kurikulum hingga kualitas guru), ada 3,7 persen menyatakan penilaian 5,4 persen sangat puas dan 63,6 persen puas. Penyediaan fasilitas pendidikan yang sangat puas dan 61,9 persen mengaku puas.

(Anang)